

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PERUM
BULOG DIVRE AMBON**

Maximiliane L C Hukom

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku

Abstrak

Writing aims to acknowledge and analyse about the accounting system sales at Perum Bulog Divre Ambon. This writing using this type of data are classified into primary data and secondary data. Next were analyzed using the methods of analysis deskriptif. Accounting information system sales at Perum Bulog Divre Ambon is a blend of process information system and procedures that form a network that closely, and are inseparable from each other, all accounting activities and other major activities, in order to streamline all other major activities of an enterprise so that supervision by the command can be run as well as possible and achievable goals efficiently.

Results of the research in deskriptif that the application of the accounting information system sales at Perum Bulog Divre can provide information for the leadership of the company, it is seen in the preparation of the information systems and procedures, sales, Procurement, transaction evidence recording of transactions to reporting information is adequate because the evidence of the transaction created some duplicate ordinal number, given the evidence, the transactions are recorded on a daily basis based on evidence of a transaction, there is code in the same transaction estimates, are grouped as well as making accounting information system reports. For the process of classification the transactions, the company has also been using the method of approximate estimation of where the code has been standardized in the form of a guidebook with explanations and usage.

Keyword : accounting system

PENDAHULUAN

Sebagaimana halnya dengan manusia, perusahaan juga menghadapi situasi ketidakpuasan dalam melangsungkan kehidupannya. Sudah tentu hal ini menimbulkan berbagai masalah dan hambatan. Informasi diperlukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan seperti kebagkrutan, pencurian, penyelewengan dan lain-lain.

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada masa sekarang ini menuntut kemampuan pemimpin perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya perusahaannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat mencapai hal tersebut informasi yang tepat

dan akurat memegang peranan sangat penting. Dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan, informasi akuntansi merupakan salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya perusahaan. Untuk mendapat informasi yang tepat dan akurat, maka diperlukan satu sistem informasi akuntansi yang dibuat menurut pola yang terpadu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.

Informasi akuntansi merupakan bagian yang paling penting dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, karena informasi akuntansi berhubungan dengan data keuangan dan transaksi keuangan suatu perusahaan. Adanya informasi akuntansi yang akurat akan membantu

manajemen perusahaan dan pihak-pihak diluar perusahaan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan salah satu sub sistem informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur dalam melakukan kegiatan penjualan sehingga tindakan manipulasi terhadap penjualan dapat dihindari. Prosedur adalah rangkaian kegiatan administrasi yang biasanya melibatkan beberapa orang suatu bagian atau lebih dan disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. Dalam sistem penjualan akan memberitahukan kepada para pengguna informasi tentang bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, dokumen apa saja yang diperlukan, serta pihak mana saja yang berwenang mengotorisasi kegiatan penjualan. Hal ini dilakukan karena uang kas adalah harta perusahaan yang paling mudah disalahgunakan, serta penjualan fiktif merupakan salah satu cara untuk dapat memanipulasi dan mencuri persediaan yang dimiliki perusahaan.

Selain itu dalam sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang sangat sulit adalah ketika terjadi penjualan kredit dan menimbulkan piutang karena terdapat rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya penjualan dan penerimaan kas. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang efektif sesuai dengan kondisi perusahaan untuk dapat melindungi

penjualan kredit dari tindakan manipulasi yang mungkin terjadi.

Begitu pula halnya dengan sistem pengendalian internnya juga memerlukan seperangkat sistem pengendalian yang mampu menjaga sistem tersebut dari kegiatan manipulasi, baik berupa manipulasi data, maupun manipulasi persediaan. Sistem pengendalian ini akan lebih rumit apabila perusahaan tersebut telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi karena banyak hal maya yang lebih rentan terhadap tindakan manipulasi.

Pada perusahaan yang penghasilan utamanya berasal dari penjualan produk, antara fungsi penjualan dengan fungsi akuntansi harus tercipta hubungan yang saling mendukung untuk memperoleh informasi akuntansi yang dibutuhkan perusahaan melalui catatan-catatan akuntansi. Dari hasil inilah akan menerima kas sebagai sumber utama pendanaan modal kerja perusahaan.

Perum Bulog merupakan perusahaan yang sangat memerlukan suatu sistem informasi yang dapat mengamankan asetnya serta mampu melakukan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penjualan. Maka dengan banyaknya transaksi yang berhubungan dengan kas, persediaan dan piutang dagang, maka perusahaan harus mampu membuat suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang efektif dan memadai sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan dapat meminimalisasi adanya ancaman manipulasi.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan bahasa dari bisnis sehingga setiap perusahaan menerapkannya sebagai alat komunikasi bisnis bagi pihak luar (*ekstern*) maupun pihak intern perusahaan. Secara klasik, akuntansi merupakan proses pencatatan (*recording*), pengelompokan (*classifying*), perangkuman (*summarizing*), dan pelaporan (*reporting*) dari kegiatan transaksi perusahaan.

Menurut Belkaoui (2000 : 37-38) “Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan yang

penting bagi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Bodnar (2003 : 1) mengemukakan “akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomis mengenai suatu badan usaha ke berbagai pihak.” Dari defenisi ini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan akuntansi adalah orang-orang yang cukup kompeten dalam bidangnya agar informasi yang disajikan benar-banar mampu mencerminkan kinerja suatu perusahaan.

Kedua uraian tersebut diatas menyatakan bahwa akuntansi menghasilkan informasi dan merupakan serangkaian usaha dan prosedur untuk menghasilkan informasi yang serupa laporan dan akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern perusahaan. Selain itu ada sedikit perbedaan dari kedua pengertian diatas yaitu perbedaan penekanan, menurut Belkaoui ditekankan informasi yang bermanfaat dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara beberapa alternatif, sedangkan menurut Bodnar informasi yang disajikan dapat benar-benar mencerminkan kinerja suatu perusahaan.

Informasi ibarat darah didalam tubuh suatu organisasi sehingga informasi menjadi sangat penting dalam organisasi. Suatu sistem yang kurang memperoleh informasi akan mengakibatkan sistem itu menjadi luruh, mengecil dan akhirnya berhenti. Oleh karena itu agar sistem terus berjalan maka sistem tersebut harus tetap memperoleh informasi yang cukup dan berguna.

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian- kejadian (*events*) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Data yang diperoleh dari satu bagian diperusahaan akan menjadi informasi untuk bagian-bagian lain perusahaan tersebut.

Skousen (2002 : 8), mendefenisikan akuntansi sebagai berikut: “*Accounting is a service activity. Its faunction is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic activities that is*

intended to be useful in making economic decision, in making choices among alternative courses of action.”

Defenisi diatas disimpulkan bahwa akuntansi bertujuan menghasilkan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak didalam perusahaan (manajemen) dan berbagai pihak diluar perusahaan (pemegang saham, pemeriksa pajak, investor, kreditor) yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan usaha tersebut.

Sistem

Sistem adalah suatu entity yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem dilihat sebagai suatu komponen yang menyeluruh bukan pada subsistem atau satu subsistem. Dengan berintegrasinya subsistem akan mengifisiensikan proses dengan mengurangi pengulangan (duplikat) data yang tidak perlu, penyimpanan, pelaporan dan proses-proses lainnya.

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen- komponen sistem dapat berupa suatu suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Suatu sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen atau subsistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat- sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran dan sasaran tujuan. Elemen-elemen sebuah sistem menurut James Hall (2001 : 5) “sebuah sistem adalah sekelompok atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (*interralated*) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (*common purpose*).”

Informasi

Informasi berarti hasil suatu proses yang terorganisasi, memiliki arti dan bagi orang yang menerimanya. Ada kalanya dibedakan antara data dan informasi. Data berarti fakta acak yang diterima sebagai masukan atau input pada suatu sistem informasi. Data

biasanya menunjukkan suatu observasi atau penguluran terhadap suatu kegiatan yang penting bagi suatu sistem informasi. Data yang sudah diproses menjadi informasi digunakan oleh pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Berkembangnya kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Perkembangan ini mengakibatkan perubahan beberapa istilah dan teknik yang digunakan. Jika sebelumnya pemrosesan data akuntansi disebut dengan sistem akuntansi, maka sekarang relevan dengan sebutan Sistem Informasi Akuntansi. Perubahan ini berkaitan erat dengan penerapan teknologi pengolahan data yang lebih efisien dan dapat mengolah informasi yang lebih banyak. Perkembangan teknologi komputer sangat mempengaruhi perubahan cara kerja akuntansi dalam mengolah transaksi menjadi informasi. Pada masa sekarang ini sistem informasi yang didasarkan pada komputer dikenal dengan istilah sistem informasi akuntansi.

Sistem Informasi Akuntansi

Organisasi sangat tergantung pada sistem informasi agar selalu dapat kompetitif. Informasi merupakan sumber daya (*resources*) yang arti pentingnya sama dengan pabrik dan peralatan. Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Sistem adalah kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Bodnar (2003 : 1) mengemukakan “sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya manusia seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan lainnya menjadi informasi.” Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini baik secara manual maupun dengan bantuan komputer. Informasi akuntansi berhubungan dengan suatu fungsi yang bertanggung jawab terhadap arus dana kedalam perusahaan. Dana diperlukan untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur

dan kegiatan lainnya maka dari itu sangat perlu mengontrol semua arus dana agar penggunaannya bisa efektif.

Sistem akuntansi adalah hal yang sangat berhubungan dengan masalah internal control dan sebagai alat bantu mengawasi dan melindungi asset perusahaan. Pada umumnya setiap pimpinan perusahaan ingin mengetahui keadaan perusahaan yang dipimpinya apakah pelaksanaan kegiatan perusahaannya telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pimpinan memerlukan informasi yang cukup sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan ini dapat dipenuhi dengan adanya suatu sistem akuntansi yang telah dirancang dengan baik.

Informasi yang dibutuhkan tersebut terutama adalah informasi yang menyangkut keuangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut maka disusunlah suatu sistem akuntansi. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak intern maupun pihak ekstern. Sistem ini dapat diproses dengan cara manual dan dengan cara menggunakan mesin seperti komputer.

Pengertian umum sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang berkaitan erat satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan ditinjau dari segi kepentingan perusahaan maka pengertian sistem adalah semua elemen, metode maupun prosedur yang terdapat dalam perusahaan itu sendiri. Untuk memahami sistem akuntansi lebih jauh berikut ini akan diuraikan definisi sistem akuntansi:

Menurut Wijyanto (2001 : 5) mengemukakan: sistem informasi akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur dan alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha satu kesatuan ekonomik sebagai tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak lain yang berkepentingan sebagai pemegang saham.

Defenisi sistem informasi akuntansi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa elemen yaitu :

- 1) Formulir, Digunakan untuk mencatat transaksi yang sedang terjadi atau melakukan pencatatan lebih lanjut
- 2) Buku catatan, Digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi dengan membuat buku jurnal dan buku besar
- 3) Prosedur-prosedur, Prosedur-prosedur adalah sekelompok pekerjaan pencatatan perusahaan yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat, yang saling berkaitan dan sukar untuk dipisahkan sendiri-sendiri.
- 4) Alat-alat, Digunakan untuk melakukan pencatatan sehingga dapat dihasilkan suatu laporan, alat-alat ini misalnya komputer, mesin tik dan lain-lain.

Informasi berguna dalam pengambilan keputusan, jika memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Relevan, suatu informasi mempunyai manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan,
- 2) Akurat, ketepatan dan dapat dihandalkannya suatu informasi,
- 3) Tepat waktu, informasi yang diperoleh terbaru dan mudah diperoleh saat dibutuhkan,
- 4) Ringkas, informasi telah dikelompokkan sehingga tidak perlu diterangkan,
- 5) Jelas, tingkat informasi dapat dimengerti oleh penerima,
- 6) Dapat dikuantifikasi, tingkat informasi dapat dinyatakan dalam bentuk angka, dan
- 7) Konsisten, tingkat informasi dapat diperbandingkan.

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber daya (*data, materials, equipment, suppliers, personal, and funds*) untuk mengkonversi input berupa data elektronik menjadi keluaran berupa informasi

keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Romney (2003 : 5) mendefenisikan system informasi akuntansi sebagai berikut: *A specialized subsistem of the management information system whose purpose its to collect, process and reports information related to financial transaction.*

METODE

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode diskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dijelaskan dengan kalimat yang sistematis sehingga penelitian ini dapat terungkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika telusuri, sejarah Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang. Campuran pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi.

Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu

lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelens Fonds (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi. Secara ringkas, perkembangannya sebagai berikut: Tugas BULOG semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam. Pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijakan Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi pada operasi *bufferstock* dimulai tahun 1970.

Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola BULOG masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi *bufferstock* bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi BULOG diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijakan umum pemerintah.

Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI No.50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.

Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI no. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok BULOG hanya mengelola beras saja. Tugas pokok BULOG diperbaharui kembali melalui Keppres no. 29/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen

logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 Nopember 2000 keluar Keppres No. 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Peralihan Menuju PERUM

Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen Bulog tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada perbedaan tugas dan fungsi dalam berbagai periode. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog harus berubah secara total. Dorongan untuk melakukan perubahan datangnya tidak hanya dari luar negeri, namun juga dari dalam

negeri. Pertama, perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi Bulog sehingga hanya diperbolehkan menangani komoditas beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Keppres RI terakhir tentang Bulog, yakni Keppres RI No. 103 tahun 2001 menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. Kedua, berlakunya beberapa UU baru, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, dan UU No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Pusat dan dihapusnya instansi vertikal. Ketiga, masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Bulog mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat, perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan *non-tariff barrier* seperti monopoli menjadi *tariff barrier* serta pembukaan pasar dalam negeri. Dalam LOI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog maupun pihak ekstern. Pertama, tim intern Bulog pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai "Paradigma Baru

Bulog". Kedua, kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun

1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, yakni LPND seperti sekarang, atau berubah menjadi Persero, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perjan atau Perum. Hasil kajian tersebut menyarankan agar Bulog memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Ketiga, kajian auditor internasional Arthur Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Bulog. Secara khusus, Bulog disarankan agar menyempurnakan struktur organisasi, dan memperbaiki kebijakan internal, sistem, proses dan pengawasan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa mendatang. Keempat, kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima, kajian konsultan internasional *Price Waterhouse Coopers* (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi Bulog, menganalisa *core business* dan tahapan transformasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga Perum. Keenam, dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III dalam berbagai *hearing* antara Bulog dengan Komisi III DPR RI selama periode 2000-2002.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik

lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas. Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perum Bulog adalah menjadi perusahaan yang handal dalam mewujudkan pangan yang cukup, aman dan terjangkau bagi rakyat. Misi Perum Bulog Divre Ambon adalah memenuhi kebutuhan pangan pokok rakyat.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dalam susunan hierarki dan pertanggung jawaban untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai badan usaha Perum Bulog Sub Divre Ambon mempunyai struktur organisasi dengan tujuan bidang usaha. Bentuk atau tipe struktur organisasi Perum Bulog Sub Divre Ambon adalah bentuk atau tipe organisasi garis dan staf. Sebagaimana lazimnya suatu perusahaan, Perum Bulog Sub Divre Ambon telah menyusun struktur organisasi perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan demikian pentingnya dalam menyelenggarakan aktivitas-aktivitas perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, dapat dilihat hubungan kerja antara satu dengan lainnya, pemberian wewenang dan tanggung jawab sehingga pekerjaan yang tumpang tindih dapat dihindarkan. Struktur organisasi Perum Bulog Sub Divre Ambon sebagaimana yang tertera pada lampiran menjelaskan sekitar fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan pada masing-masing personil sesuai dengan jabatannya. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Perum Bulog Sub Divre Ambon, membagi tugas dan tanggung jawabnya dari setiap bagian yang ada pada perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi Perum Bulog Sub Divre Ambon

Perum Bulog Sub Divre Ambon menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yang sudah menggunakan sistem komputerisasi yang online terhadap pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi. Proses pencatatan informasi akuntansi dilakukan dengan sistem komputerisasi yang dilakukan secara harian, sedangkan dalam hal pelaporan informasi akuntansi dilakukan secara bulanan. Sistem ini disebut dengan (SIAB) Sistem Informasi Akuntansi Bulog.

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Penjualan Tunai

Di dalam bab II telah dijelaskan bahwa penjualan ada dua macam, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Perum Bulog Sub Divre Ambon sebuah perusahaan jasa, sehingga penghasilan utamanya adalah berasal dari penjualan. Penjualan Perum Bulog Sub Divre Ambon difokuskan pada penjualan Raskin. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Perum Bulog Sub Divre Ambon mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada prinsipnya dilakukan secara tunai, maka prosedur penjualan tunai dilakukan sebagai berikut:

- 1) setiap penjualan dalam perusahaan ini akan selalu dimulai dengan adanya pengajuan Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Walikota/Bupati kepada Kasub divre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan berdasarkan data RTS dari BPS,
- 2) Kepala Desa membayar Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin kepada bagian keuangan atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui bank setempat setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM,
- 3) Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (TT-HP) rangkap 4 (empat) oleh bagian keuangan. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Kepala Desa, Tanda Terima Pembayaran (TT-HP) diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank terkait. TT-HP ini terdiri dari tiga warna yaitu:
 - a) putih : diberikan untuk Kepala Desa
 - b) kuning : merupakan arsip bagian keuangan
 - c) merah : diberikan kepada gudang
 - d) biru : diberikan kepada bagian Pelayanan Publik
- 5) Bagian Pelayanan Publik menerbitkan SPPB/DO beras yang ditandatangani Kasub divre untuk masing-masing Kecamatan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi yang dilakukan,
- 6) berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog Sub Divre Ambon, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi,
- 7) Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada RTS-PM pemegang

kartu Raskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili RTS-PM,

- 8) Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa atau petugas yang mewakili dan distempel Desa serta nama seluruh penandatanganan dicantumkan secara jelas.

Penjualan Kredit

Berdasarkan data yang ada dilapangan, apabila RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka penjualan dapat dilakukan secara kredit. Prosedur penjualan secara kredit dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap penjualan dalam perusahaan ini akan selalu dimulai dengan adanya pengajuan Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Walikota/Bupati kepada Kasub divre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan berdasarkan data RTS dari BPS,
2. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan jaminan tertulis dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat. Pelunasan selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasan diselesaikan,
3. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (TT-HP) rangkap 4 (empat) oleh bagian keuangan. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Kepala Desa, Tanda Terima

Pembayaran (TT-HP) diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank terkait. TT-HP ini terdiri dari tiga warna yaitu:

- a) putih : diberikan untuk Kepala Desa
- b) kuning : diberikan kepada bagian Pelayanan Publik
- c) merah : diberikan kepada gudang
- d) biru : merupakan arsip bagian keuangan

4. Bagian Pelayanan Publik menerbitkan SPPB/DO beras yang ditandatangani Kasub divre untuk masing-masing Kecamatan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi yang dilakukan ,

5. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog Sub Divre Kerinci, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi,

6. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada RTS-PM pemegang kartu Raskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili RTS-PM,

7. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa atau petugas yang mewakili dan distempel Desa serta nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas,

D. Sistem Pengendalian Intern

a. Otorisasi (Pengesahan Transaksi)

Sistem otorisasi disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Satker Raskin dan Pelaksanakan Distribusi serta diketahui Kepala Desa/Camat. Nama seluruh penandatangan dicantumkan dengan jelas dan distempel Desa/Kecamatan.

b. Pemisahan Tugas

Struktur organisasi ditandai dengan adanya pemisahan fungsi antara bagian

pelayanan publik, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Fungsi pencatatan dan penyimpanan harus mendapat pemisahan tugas dan tidak terdapat satu orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

c. Supervisi (Pengawasan)

Pegawai yang bekerja melakukan tugasnya sesuai dengan aturan dan tanggung jawabnya yang terdapat dalam deskripsi kerja serta jumlah pegawai yang dibutuhkan di setiap bagian harus memadai sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada sehingga pelaksanaan supervisi tidak terlalu dominan dan tidak terlalu memerlukan supervisi dalam pelaksanaan tugas operasional setiap bidang yang ada dalam perusahaan walaupun ada bagian pengawasan.

d. Catatan Akuntansi

Penggunaan dokumen dan catatan yang berisi dan dinomori terlebih dahulu telah dilakukan terhadap semua dokumen transaksi seperti voucher dan yang lainnya telah disiapkan pada saat transaksi terjadi.

e. Pengendalian akses

Untuk dapat melindungi dan mengamankan aktiva dan catatannya, Perum Bulog Divre melakukan pengendalian yang meliputi:

1. Pengguna gudang mendapatkan penjaga untuk mengamankan gudang,
2. perusahaan juga telah melakukan penyimpanan persediaan barang-barang untuk menghindari pencurian,
3. pengamanan datanya dengan melakukan *back up* data ke dalam CD, flashdisk, untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan terhadap komputer,
4. penyetoran uang kas secara harian ke bank,
5. penggunaan kotak penyimpanan (brankas) uang yang aman, dan
6. pengamanan laci kas dengan melakukan penguncian pada bagian loket.

Analisis dan Evaluasi Penelitian

Analisis dan Evaluasi Struktur Organisasi

Sistem informasi akuntansi tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi, karena sistem informasi akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, mengorganisir, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi suatu aktivitas perusahaan dalam pencapaian tujuan organisasi. Berbagai metode, prosedur dan teknik dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan hanya dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam struktur organisasi yang jelas yang memisahkan tanggung jawab secara tepat, demikian pula ketetapan dalam pemberian wewenang untuk suatu fungsi.

Sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, maka struktur organisasi harus dirancang dengan memenuhi prinsip *internal control* yang mensyaratkan terpisahnya fungsi operasional, fungsi pencatatan dan fungsi penyimpanan demi tercapainya tujuan *internal check*, sehingga perusahaan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan dalam organisasi. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu tepat bagi perusahaan lain. Perbedaan penetapan struktur organisasi yang berbeda disebabkan oleh beberapa hal antara lain: jenis perusahaan, besar kecilnya perusahaan, bidang operasi perusahaan dan lain-lain.

Manajemen menggunakan struktur organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka seluruh organisasi baik bawahan maupun atasan mendorong untuk memberikan sumbangan yang maksimum terhadap aktivitas perusahaan. Satu dasar pertimbangan yang penting dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah agar struktur organisasi yang ditetapkan harus dirancang secara sefleksibel mungkin dalam menghindari adanya perubahan total apabila mengadakan penyesuaian-

penyesuaian yang disebabkan perkembangan perusahaan.

Struktur organisasi beserta uraian tugasnya merupakan salah satu cara atau unsur pengendalian manajemen yang penting. Struktur organisasi merupakan kerangka (*frame work*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Salah satu persyaratan agar organisasi dapat efektif sebagai sarana pengendalian adalah tanggung jawab harus dibagi sehingga tidak seorangpun diperkenankan melakukan suatu kegiatan atau transaksi dari awal sampai akhir tanpa campur tangan orang lain.

Organisasi perusahaan ini telah memenuhi unsur-unsur organisasi yaitu adanya sekelompok orang, interaksi, kerjasama dan pembagian kerja, adanya struktur dan tujuan yang dicapai perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba. Disamping itu perusahaan ini juga telah berpedoman pada beberapa azas atau prinsip-prinsip organisasi yaitu adanya perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, delegasi kekuasaan, rentang kekuasaan, kesatuan perintah dan tanggung jawab.

Telah dibicarakan pada bab sebelumnya, bahwa sistem informasi akuntansi yang handal harus didukung pengendalian intern yang handal pula, dengan kata lain, tanpa adanya pengendalian intern yang baik, satu perusahaan tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang baik pula. Sistem pengendalian intern menempatkan struktur organisasi sebagai unsur yang pertama. Dalam sistem pengendalian intern struktur organisasi dituntut harus secara tegas menguraikan tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pegawai sehingga tidak terjadi tumpang tindih satu pekerjaan ataupun fungsi oleh para anggota organisasi. Dengan adanya pengendalian intern yang memuaskan, diharapkan catatan akuntansi dan laporan keuangan dapat lebih diandalkan dan dipercaya.

Struktur organisasi Perum Bulog Sub Divre Ambon menggambarkan struktur organisasi garis dan staf dimana masing-masing staf bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing atau yang telah ditetapkan. Struktur organisasi perusahaan ini cukup memadai bila ditinjau dari segi struktur organisasinya karena telah menggambarkan adanya pemisahan fungsi atau pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik, hal ini menyebabkan semua kegiatan mudah dikordanisasikan. Struktur organisasi perusahaan ini pada umumnya telah menunjukkan suatu ciri pengendalian intern yang baik, yaitu adanya pengaturan organisasi, sistem otorasi dan prosedur dan pencatatan, namun belum ada praktik yang sehat yang dijalankan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap bagian organisasi, hal ini terbukti belum adanya pengaturan alih tugas untuk para pejabat atau pegawai secara teratur.

Unsur lain yang sangat penting dalam pengendalian intern adalah pegawai yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawabnya. Tingkat kecakapan pegawai mempengaruhi suksesnya suatu pengendalian intern. Apabila sudah disusun struktur organisasi yang tepat, prosedur-prosedur dan pemisahan fungsi yang baik, tetapi tingkat kemampuan pegawai tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta dapat dipastikan bahwa pengendalian internnya juga tidak berhasil.

Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Sistem merupakan cara-cara atau langkah yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan salah satu sarana pengendalian manajemen yang penting pula. Dalam melaksanakan suatu prosedur, secara administrasi dibantu dengan berbagai formulir-formulir atau blangko yang telah dirancang sehingga prosedur yang dilaksanakan tercatat dan tampak dalam pengisian blangko tersebut.

Untuk mewujudkan adanya sistem informasi penjualan yang baik, sistem penjualan yang diterapkan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian intern, sehingga tujuan pengendalian intern atas penjualan dapat tercapai. Pada sistem informasi akuntansi penjualan di Perum Bulog Sub Divre Ambon, penerapan terhadap sistem tersebut menurut penulis sudah sangat baik. Berikut ini penulis akan menyajikan evaluasi terhadap prosedur-prosedur penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Ambon.

Prosedur Penjualan

Analisis prosedur penjualan yang diterapkan pada Perum Bulog Sub Divre Ambon sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi ke dalam catatan akuntansi dilakukan oleh bagian akuntansi dengan didasarkan pada bukti-bukti transaksi yang lengkap guna memastikan kebenaran transaksi.
2. Penerimaan kas dari pembeli di otorisasikan bagian kasir dengan memberikan stempel pada faktur penjualan.
3. Perusahaan menetapkan apabila ada order dari pelanggan maka disetujui kepala terlebih dahulu, kemudian diterbitkan SPPB/DO dalam beberapa rangkap yang tebusannya diberikan kepada pelanggan, gudang dan operasional. Dari prosedur diatas dapat dilihat bahwa sales order yang ada harus disetujui oleh kepala. Secara teori dapat kita lihat pengawasan yang baik terhadap kontrol pemberian kredit. Maka dalam hal ini penyelewengan dan kecurangan dapat dihindari.
4. Bukti-bukti transaksi yang berhubungan dengan penjualan telah diberikan nomor urut dan dicatat berdasarkan nomor urut serta tanggal transaksi sehingga pemakaiannya dapat dipertanggung jawabkan dan mudah ditelusuri guna pengawasan
5. Kas yang telah diterima dari kepala

desa, pada perusahaan ini tidak semua langsung disetorkan ke Bank pada hari itu juga. Hal ini telah menunjukkan bahwa kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi pada perusahaan seperti adanya pencurian bencana kebakaran dan tidak mendapat jasa giro.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disebutkan prosedur penjualan Perum Bulog Sub Divre Ambon cukup memadai, baik pengadaan bukti-bukti atau dokumentasi transaksi, pencatatan atas penjualan maupun laporan.

Pencatatan dan Pelaporan

Akuntansi merupakan metode pengendalian financial yang penting terhadap kegiatan-kegiatan sumber dan pertanggung jawaban pada bidang- bidang tertentu. Kegiatan-kegiatan akuntansi tersebut akan menghasilkan produk yang tentunya sangat mempengaruhi proses operasi perusahaan. Produk akuntansi tersebut bernama laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas ditambah dengan catatan laporan akuntansi. Laporan keuangan ini akan menggambarkan keadaan perusahaan terutama keadaan keuangan dan kinerja perusahaan yang sangat berpengaruh pada kelanjutan perusahaan dimasa yang akan datang.

Dalam uraian terdahulu dapat diketahui pencatatan dan proses sistem informasi akuntansi penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Ambon. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa setiap transaksi dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen. Dokumen tersebut berupa formulir dan surat-surat yang dikerjakan saat aktivitas berlangsung. Pembuatan dokumen tersebut dimaksud dikerjakan oleh bagian-bagian yang terlibat dalam aktivitas penjualan. Ini berarti batas wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan sudah terlihat. Dokumen-dokumen tersebut lalu dicatat kedalam buku jurnal apabila terjadi transaksi penjualan baik kredit maupun tunai secara harian.

Selain itu agar perkiraan-perkiraan yang diinginkan dapat dengan mudah dirumuskan perusahaan menggunakan kode perkiraan dalam siklus akuntansinya. Dengan menggunakan kode perkiraan dalam pencatatan, pengelompokan dan pengiktisaran transaksi oleh perusahaan, dimana kode perkiraan ini telah dibukukan dalam buku pedoman perkiraan. Penulis berpendapat bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan akan lebih handal untuk pengambilan keputusan.

Selain itu keputusan akan lebih mudah diambil jika informasi yang dibutuhkan sudah tersaji dalam bentuk laporan, karena laporan merupakan media yang digunakan untuk member informasi pelaksanaan suatu rencana. Laporan keuangan yang dibuat Perum Bulog Sub Divre Ambon meliputi neraca, laporan laba rugi. Penulis berpendapat bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan telah menunjukkan kelengkapan, dimana saldo awal, perubahan saldo akhir suatu pos diungkapkan.

KESIMPULAN

Akuntansi merupakan informasi yang memberikan data keuangan bagi pimpinan perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi. Sistem informasi akuntansi merupakan proses perpaduan antara sistem informasi dan prosedur- prosedur yang membentuk suatu jaringan yang erat hubungannya, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, semua kegiatan akuntansi dan kegiatan-kegiatan utama lainnya, guna mengefektifkan semua kegiatan-kegiatan utama lainnya dari suatu perusahaan sehingga pengawasan oleh pimpinan dapat dijalankan sebaik-baiknya dan dapat dicapai tujuan perusahaan secara efisien.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan data yang dilakukan penulis tentang sistem informasi akuntansi penjualan pada Perum Bulog Divre

Ambon, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi pada Perum Bulog Divre Ambon merupakan kumpulan prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam atas seluruh transaksi maupun kegiatan dalam perusahaan.
2. Struktur organisasi Perum Bulog Divre secara umum telah memadai dimana menggambarkan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab tiap-tiap bagian. Tetapi masih tidak terdapat satu bagian yaitu bagian penagihan.
3. Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan pada Perum Bulog Divre dapat memberikan informasi bagi pimpinan perusahaan, hal ini dilihat pada penyusunan sistem informasi dan prosedur penjualan,
4. Pengadaan bukti-bukti transaksi, pencatatan transaksi sampai pelaporan informasi sudah memadai karena bukti-bukti transaksi dibuat beberapa rangkap, diberi nomor urut bukti, transaksi dicatat setiap hari berdasarkan bukti transaksi, terdapat kode perkiraan, transaksi yang sama dikelompokkan serta membuat laporan hasil sistem informasi akuntansi.
5. Untuk proses pengklasifikasian transaksi, perusahaan juga telah menggunakan metode perkiraan dimana kode perkiraan telah dibakukan dalam bentuk buku pedoman yang dilengkapi dengan penjelasan dan penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bodnar, George, H dan William S. Hopwood, 2003. *Accounting Information System*, Edisi Keenam, Buku Satu, Terjemahan A.A. Jusuf dan R.M. Tambunan, Salemba Empat, Jakarta.

Hall. James A., 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Pertama, Buku Satu, Terjemahan Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat.

Mulyadi, 1993. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

Purwono, Edi., 2004. *Aspek-Aspek ADP Audit Pengendalian Intern Pada Komputerisasi*, Andi, Yogyakarta.

Riahi, Ahmad dan Belkaoui, 2002. *Teori Akuntansi*, Edisi Pertama, Terjemahan Marwata, Harjanti Widiastuti, Ch.Heni Kurniawan dan Alia Ariestanti, Jilid I, Salemba Empat, Jakarta.

Romney, Steinbart, 2003. *Accounting Information System*, International Edition, Prentice, Hall, United State of America.

Skousen, Albrecht, Stice., 2002. *Akuntansi Keuangan*, Buku Satu, Terjemahan Thomson Learning Asia, Salemba Empat, Jakarta.

Wijyanto, Nugroho, 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Erlangga, Jakarta. Wilkinson, Joseph. W., Michael J. Cerullo, Variant Raval, Bernard Wong-on-wing, 2002. *Accounting Information System*, Edisi Keempat Jhon Wiles Ansons, United States of America.

Teguh, Muhammad, 1990. *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Edisi Satu, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan.